KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masuk APBN 2021: Mimpi Ibu Kota Baru Belum Wassalam
Tanggal : Senin, 22 Juni 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

Masuk APBN 2021

Mimpi Ibu Kota Baru Belum Wassalam



Mimpi Presiden Jokowi untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur itu, ternyata belum wassalam. Meski kocek negara jebol karena kasus corona, proyek ambisius tersebut bakal tetap lanjut. Buktinya, pemerintah menyiapkan *budget*-nya dalam APBN 2021.

PEMINDAHAN IKN menjadi salah satu proyek prioritas Jokowi di kepemimpinan periode keduanya. Lokasi IKN sudah ditetapkan di Kecamatan Sepaku, perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Targetnya: tahun 2024 proyek yang ditaksir menelan dana

♦ BERSAMBUNG KE HAL 8

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Mimpi Ibu Kota Baru

... DARI HALAMAN 1

Rp 466 triliun ini, bakal kelar.

Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mensukseskan proyek tersebut sejak tahun lalu. Namun munculnya pandemi Covid-19, membuat penyelesaian proyek ini terganggu.

Akhir Mei lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut proyek ini tak akan dianggarkan dalam APBN 2021. Di akhir Mei juga, pemerintah memutuskan menunda pembangunan fisik IKN. Namun, hal itu tak menghentikan proyek ini. Berbagai kajian terus berlanjut.

Terbaru, pemerintah menganggarkan proyek ini dalam APBN 2021. Hal ini diketahui setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan RAPBN 2021 kepada DPR, awal pekan lalu. Ini berarti IKN tetap lanjut? Sri Mul tak menjawab lugas. Dia bilang fokus pemerintah saat ini adalah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberi kisi-kisi. Kata dia, kalau proyek pembangunan IKN bisa memulihkan perekonomian, seperti bisa membuka lapangan pekerjaan serta menarik investor, pemerintah akan memberikan alokasi anggaran. Artinya, akan masuk dalam APBN 2021.

Namun, jika proyek IKN ini tidak bisa membantu memulihkan perekonomian nasional, pemerintah akan menganggarkan saat keuangan negara lebih baik. Tapi yang pasti, kata dia, nasib soal ibu kota baru akan disampaikan Presiden Jokowi saat membacakan Nota Keuangan 2021 Agustus nanti.

Bagaimana kajian Pemerintah? Awal bulan lalu, Bappenas menyebut pembangunan IKN bisa jadi salah satu cara memulihkan roda perekonomian pasca pandemi. Proyek ini akan membuka banyak lapangan kerja dan akan memberi efek berantai luar biasa. Proyek ini juga akan memutar roda perekonomian. Kata Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, banyak investor kesengsem ingin ikut proyek ini.

Kendati Sri Mulyani belum memberikan ketegasan, namun Anggota Banggar DPR, Didik Mukrianto masih melihat ada keinginan pemerintah tetap melanjutkan proyek IKN.

Saat ditanya apakah anggaran IKN sudah tertulis jelas dalam RAPBN 2021 yang diserahkan pemerintah ke DPR? Didik tak mau menyebut angkanya. Secara prosedural, kata dia, RAPBN 2021 yang diserahkan pemerintah akan dibahas di masing-masing komisi. Soal anggaran IKN akan dibahas di Komisi V DPR. Namun berapa banyak yang dianggarkan, Didik mengaku belum tahu pastinya.

Ia berharap pemerintah memikirkan ulang melanjutkan proyek IKN.

Kata dia, kondisi keuangan negara saat ini sedang tertekan karena pandemi. Keadaan pun sedang darurat. Terlihat dari pemerintah akhirnya menerbitkan Perppu penanganan corona. Dalam kondisi ini yang dibutuhkan adalah penanganan kesehatan dan keselamatan.

"Sangat tidak masuk akal bila mengalokasikan anggaran yang bukan untuk penanganan Covid-19," kata Didik kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Polisi Partai Demokrat ini menilai pembagunan IKN belum terlalu urgen. Pemerintahan masih bisa berjalan dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah fokus pemulihan ekonomi dan sosial. Banyak rakyat yang kena PHK belum kebagian bantuan sosial. "Ke depan bukan hanya proyek ibu kota yang harus ditunda dulu. Semua proyek mercusuar pembangunan infrastruktur mestinya ditunda dulu," ungkapnya.

Terkait kajian apakah pembangunan IKN bisa menggerakkan ekonomi, dia bilang, dalam kondisi normal apa yang disampaikan Bappenas ini bisa jadi diskursus. "Tapi dalam kondisi sekarang, sepertinya jauh panggang dari api," ujarnya.

Anggota Banggar dari PKS, Nasir Djamil menilai keputusan soal proyek IKN masih tarik ulur. Dia bilang, Banggar DPR akan memulai membahas topik ini dengan Menko Perekonomian, hari ini. Kepastian apakah proyek berlanjut atau ditunda tergantung hasil rapat di DPR. "Saya sendiri berpandangan sebaiknya ditunda. Karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi.

Pembangunan ibu kota tidak urgen. Pendapatan pajak kita tidak sesuai harapan. Sementara kebutuhan belanja kita besar," papar Nasir kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, alasan paling mendasar, logis dan masuk akal adalah menunda proyek ini. Karena sekarang negara sedang tidak punya duit. Soal kajian bahwa proyek ini bisa menggerakkan ekonomi, politisi PKS ini tak terlalu percaya. "Itukan asumsi dan prediksi dalam kondisi normal. Kalau dalam pandemi kan belum pasti. Jadi menurut saya, sebaiknya fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Jangan terlalu berambisi," ucapnya. ■ BCG